

DAFTAR PUSTAKA

Bacaan (Berita, Jurnal, Buku)

Berita:

- Hanafi, U. (2020, November 3). *https://smjtimes.com*. Retrieved from <https://smjtimes.com/2020/11/03/pati-menempati-peringkat-1-angka-kematian-Covid-19-se-jateng/>
- Koesno, D. (2020, Desember 25). *https://tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/update-corona-dunia-25-desember-797-juta-kasus-data-who-terbaru-f8Wu>
- Rahmawati. (2020, November 15). *https://mitrapost.com*. Retrieved from <https://mitrapost.com/2020/11/15/ralat-berita-kasus-kematian-Covid-19-kabupaten-pati-peringkat-11-tingkat-nasional/>

Jurnal:

- Anandadin, T. K. (2021). *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Phpr) di Kota Bogor*.
- Aruan, Y. G. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Dahuri, A., Harjo, D., & Balancia, C. (2021). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi di Masa Pandemi Covid-19).
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 108-124.
- Fitria, L., & Ifdil, I. (2020). Kecemasan remaja pada masa pandemi Covid -19. 1-4.
- Handaka, R. D. (2017). *Buku I Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan.
- Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Lencana, I. B. (2021). *Pengaruh Pengurangan Sanksi Administrasi Sebesar 100% Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran di Kabupaten Badung Akibat Adanya Pandemi Covid-19*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.
- Matdio.Siahaan. (2019). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia . *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 1-3.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat*

- Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 212-224.
- Nisa', M. F. (2021). *Dampak Penerapan Kebijakan Pembebasan Pajak Restoran di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek*.
- Putra, N. D. (2021). Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 705-709.
- Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods Fors Business Students*. United Kingdom.
- Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Soessanto, M. E. (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Program Diploma Keuangan Spesialisasi Pajak Konsentrasi PBB-P2*. Jakarta.
- Sucahyo, A. D. (2021). *Tinjauan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro di Era Pandemi*.
- Sumadi. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah . *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 145-162.
- Supadmi, N. L. (n.d.). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*.
- Syahadini, A. M. (2021). *Tinjauan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Tangerang Selatan.

Peraturan:

- Bupati Pati. (2017). Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Kabupaten Pati. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Pemerintah Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan .
- Pati, B. (2017). Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Pati, K. (2008). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
- Pati, K. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pati, K. (2016). Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016.

- Pati, K. (2019). Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016.
- Pati, K. (2016). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Pati, K. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011.
- Pati, K. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).